

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG)

Andi M. N. Afdhal

*Program Studi Akuntansi, STIE Lamappapoleonro Soppeng
e-mail : andafdal@gmail.com*

ABSTRAK

Laporan keuangan adalah salah satu elemen terpenting dan tidak terpisahkan dari suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data primer. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan implementasi SAP, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Data-data ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang akan didistribusikan kepada setiap responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, kepala keuangan, dan staf keuangan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi dan kontrol internal pemerintah dapat dinyatakan telah diterapkan dengan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Soppeng juga memiliki kualitas yang baik, dapat diidentifikasi berdasarkan pendapat yang diberikan oleh BPK.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi, Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

The financial statements are one of the most important and inseparable elements of an entity. The preparation of government financial statements is a manifestation of the transparency and accountability of state financial management. This research was conducted in 2017. The purpose of this study is to find how well the application of Government Accounting Standard, internal control, and quality of financial statements in The Regional Government Soppeng. Sources of data in this study gathered from the primary data. The data required in this study are data that is associated with the implementation of SAP, internal control, and quality of financial statements. These data are collected by using questionnaires that will be distributed to each respondent. The respondents in this study are head of SKPD, head of finance, and finance staff. The results concluded that the application of government accounting standards and internal controls can be stated that have been applied correctly in accordance with applicable government regulations. The quality of the financial statements in The Regional Government Soppeng also has good quality, it can be identify based on the opinion given by BPK.

Keywords: Implementation of Accounting Standard, Internal Control and Quality of Financial Statement.

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah suatu bagian yang terpenting dari sebuah entitas. Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan yang baik, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Armando, 2013).

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya

(SAP, 2010). Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentunya merupakan suatu kewajiban. Laporan keuangan yang baik menunjukkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik pula, yang melingkupi pengelolaan berdasarkan tertib administrasi dan taat asas. Untuk menunjukkan baik maupun tidaknya kualitas sebuah laporan keuangan, dapat diketahui melalui opini yang ditetapkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan Keuangan Pemda. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan tingkatan kualitas laporan keuangan tertinggi yang

diberikan oleh BPK untuk menyatakan laporan keuangan telah sesuai dengan standar.

Kriteria yang harus dimiliki oleh laporan keuangan agar dapat dikatakan berkualitas diantaranya adalah relevan, andal, bias dibandingkan, dan mudah dipahami (PP No. 24 Tahun 2005). Agar laporan keuangan sesuai dengan kriteria tersebut, maka disusunlah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang tercantum dalam PP No. 24 Tahun 2005, yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 71 Tahun 2010. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian Nurlaila (2014), mengatakan bahwa SAP mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, pengelolaan anggaran pemerintah juga harus diselenggarakan sesuai dengan system pengendalian internal yang memadai. Penelitian yang dilakukan Madhjam (2013) mengindikasikan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan. Penelitian Rihana (2014) juga mendukung hasil dari penelitian ini. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang kualitas laporannya mengalami peningkatan. Berikut data opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 2008-2015 yang diberikan oleh BPK RI.

Tabel 1. Opini LKPD Kabupaten Soppeng 2008-2015

No.	LKPD (Tahun)	Dilaporkan pada IHPS I	Dilaporkan pada IHPS II
1	2009	WDP	WDP
2	2010	WDP	WDP
3	2011	WDP	WDP
4	2012	WDP	WDP
5	2013	WDP	WDP
6	2014	WTP	WTP
7	2015	WTP	WTP
8	2016	WTP	WTP
9	2017	WTP	WTP
10	2018	WTP	WTP

Sumber: BPK (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 hingga 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selalu mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan pada tahun 2014 hingga 2018 terjadi peningkatan opini menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diraihnya opini WTP ini

mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah terjadi peningkatan yang baik dalam hal pelaporan keuangan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng seharusnya menunjukkan bahwa penyelenggaraan anggaran kabupaten ini sudah dijalankan dengan baik, serta membuktikan bahwa laporan keuangannya sudah disusun sesuai dengan SAP. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik dengan hasil opini yang diberikan BPK tentang laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Adanya peningkatan opini dari WDP menjadi WTP membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan SAP, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, maka dari itu penulis mengambil penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng". Penelitian ini merujuk pada penelitian Nurlaila (2014) tentang "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dipemerintahan kabupaten Enrekang dan Herawati (2014) tentang "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis hanya ingin mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Pemikiran

Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dengan tujuan agar penyelenggaraan akuntansi pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD (<http://www.wikiapbn.org/>). Bastian (2010:137) menyatakan bahwa SAP merupakan suatu prinsip akuntansi yang diimplementasikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan).

2.2. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan rencana suatu entitas dan metode bisnis yang digunakan untuk melindungi aset, membuat dan menghasilkan informasi yang tepat, andal, juga mendorong serta memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong agar sesuai dengan kebijakan (Romney dan Steinbart, 2009:229). Menurut Rai (2010), system pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa guna member pernyataan yang meyakinkan manajemen bahwa organisasi telah berhasil mencapai tujuan dan sarannya. Dalam *Internal Control – Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai agar tujuan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap UU dan peraturan yang berlaku, serta pengoperasian yang efektif dan efisien yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui PP No. 60 Tahun 2008 pemerintah telah membuat suatu system pengendalian internal yang mesti dilaksanakan baik pada tingkat Pempus maupun Pemda. Sistem pengendalian internal tersebut merupakan proses yang mencakup pada kegiatan juga tindakan yang dilaksanakan secara simultan oleh pemimpin dan semua pegawai dalam hal member keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran organisasi melalui efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sari, 2012:722).

2.3. Kualitas Laporan Keuangan

Juwita (2013:205) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunaannya. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, sebuah organisasi harus mempunyai Sistem informasi yang baik, sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor public seperti di Pemerintah Daerah. Mardiasmo (2009:20) menjelaskan bahwa akuntabilitas public merupakan kewajiban pihak agen (pemegang amanah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan

semua kegiatan operasinya kepada pihak principal (pemberi amanah) yang memiliki kewenangan dan juga hak dalam rangka meminta pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2010:21) melanjutkan bahwa terdapat dua jenis bentuk akuntabilitas publik. Pertama, akuntabilitas yang bersifat vertical yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Terhadap pihak yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban dinas terhadap pemda, tanggungjawab pemda terhadap pemerintah pusat, dan tanggungjawab pemerintah pusat kepada MPR. Kedua, pertanggungjawaban yang bersifat horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Dalam PP No. 71 (2010) disebutkan bahwa, agar laporan keuangan memiliki manfaat bagi pihak yang memakainya, maka informasi yang terkandung pada laporan keuangan itu haruslah memiliki kualitas yang baik dan juga dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi pihak entitas. Terdapat empat komponen kualitatif laporan keuangan yang menjadi syarat agar suatu laporan keuangan berkualitas tinggi:

1) Relevan

Laporan keuangan relevan jika didalamnya memiliki informasi yang bias berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Informasi yang relevan mencakup beberapahal berikut:

- Terdapat informasi berupa feedback value
- Terdapat informasi yang bersifat prediktif (predictive value)
- Informasi yang disajikan tepat waktu
- Informasi yang disajikan tersedia secara lengkap

2) Andal

Informasi yang terdapat di dalam sebuah laporan keuangan tidak memiliki informasi yang bias menyesatkan dan terhindar dari salah saji material, setiap informasi disajikan dengan jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Informasi disajikan secara jujur
- Informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi (*verifiability*)
- Informasi bersifat netral.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat pada sebuah laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang tersaji pada laporan keuangan mudah untuk dipahami maupun dimengerti bagi pihak pengguna laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Aspek Penelitian

Desain Penelitian Menurut Sekaran (2006:155) ada beberapa aspek yang menjadi dasar dari desain penelitian yaitu tujuan dalam melakukan studi, jenis investigasi yang dilakukan, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis yang digunakan, dan horizon waktu. Adapun beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Lingkungan Penelitian
Penelitian ini bersifat studi lapangan yang dilakukan pada seluruh SKPD Kabupaten Soppeng.
- 2) Tingkat Intervensi peneliti terhadap studi
Penelitian ini menggunakan intervensi minimal. Hal ini disebabkan karena peneliti tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi hubungan antar variabel.
- 3) Situasi studi
Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah/normal. Oleh karena itu, situasi studi pada penelitian ini tidak diatur oleh peneliti.
- 4) Unit analisis
Pada penelitian ini, unit analisisnya merupakan seluruh SKPD Kabupaten Soppeng.
- 5) Horizon waktu
Horizon waktu pada penelitian ini berupa studi cross-sectional yaitu data-data dikumpulkan dalam waktu tertentu dalam rangka menjawab kuesioner yang diberikan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Soppeng dengan seluruh SKPD sebagai unit analisisnya. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Bagian Keuangan, dan staff bagian keuangan.

3.3. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian berasal dari data primer. Sekaran (2009) mengatakan bahwa data primer merupakan data yang langsung didapat dari sembarinya untuk tujuan penelitian. Data primer dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung kepalangan (*field research*). Data yang dibutuhkan berupa data yang berhubungan dengan penerapan SAP, system pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner yang nantinya akan diserahkan kepada masing-masing responden. Metode Analisis Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif. Analisis juga mengkaji hasil penelitian dengan teori-teori mengenai penerapan SAP dan pengendalian internal. Data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan software Mirosoft Excel dan software SPSS.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan gambaran dari frekuensi responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian terhadap penerapan SAP, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Analisis deskriptif menjelaskan pilihan jawaban responden dari 1 sampai 5 yang menggambarkan tingkatan jawaban mengenai indikator-indikator pernyataan yang dipersepsikan oleh responden. Deskriptif statistic disajikan pada table berikut :

Tabel 2. Responden

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	69	3,38	5	4,1431	0,35243
Sistem Pengendalian Internal;	69	3	4,95	4,0231	0,40751
Kualitas Lapoaran Keuangan	69	3,44	4,89	4,0644	0,31966
Valid N (listwise)	69				

Tabel 2 menunjukkan penerapan SAP memiliki nilai minimum jawaban responden sebesar 3,38, maksimum jawaban responden 5,00, dan rata-rata jawaban responden 4,14. Sistem pengendalian internal memiliki nilai minimum jawaban responden 3,00, maksimum jawaban responden 4,95, dan rata-rata jawaban responden 4,02. Kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum jawaban responden 3,44, maksimum jawaban responden 4,89, dan rata-rata jawaban responden 4,06.

4.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dari hasil persepsi responden yang telah dikumpulkan diatas, dapat dikatakan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap item pernyataan yang

berkaitan dengan Penerapan SAP adalah setuju. Ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP termasuk dalam kategori efektif. Jika dihubungkan dengan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa SAP di Kabupaten Soppeng diterapkan dengan baik. Kartika (2013) dan Nurlaila (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa SAP memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian semakin baik penerapan SAP, maka semakin besar pula kemungkinan laporan keuangan di Kabupaten Soppeng memiliki kualitas yang baik.

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk member keyakinan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006) Skor rata-rata masing-masing pernyataan dari system pengendalian internal adalah 4,02, dimana angka ini dapat dikatakan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap item pernyataan yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal adalah setuju. Ini menunjukkan bahwa pengendalian internal di Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng juga telah diterapkan dengan baik.

Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan pemerintah sudah baik, ini dapat dilihat dari skor rata-rata masing-masing pernyataan dari kualitas laporan keuangan 4,06, dimana angka ini dapat dikatakan bahwa rata-rata tanggapan responden terhadap item pernyataan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan adalah setuju. Bukti ini juga semakin didukung oleh opini dari BPK yang memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Soppeng.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian ini, kesimpulan yang dapat penulis ambil terkait rumusan dan tujuan penelitian, yang kemudian dijabarkan dalam hasil penelitian adalah Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah setuju yang artinya bahwa ketiga variable tersebut telah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, Daniel Kartika & Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Kelantan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal STIE Semarang. No. 3 Vol. 5.

Agoes, Sukrisno. 2008. Auditing: (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah Kabupaten Batang). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris di Kota Bukit Tinggi). Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tanpa Tahun. Hubungan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dengan Terjadinya Penyimpangan Kasus Korupsi. Melalui [http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2289/14.072-Hubungan-Opini-BPK-atas-Lapkeu-Daerah-Dengan-Terjadinya-Penyimpangan-Kasus-Korupsi\[22/8/16](http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2289/14.072-Hubungan-Opini-BPK-atas-Lapkeu-Daerah-Dengan-Terjadinya-Penyimpangan-Kasus-Korupsi[22/8/16)

Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Jurnal Akuntansi. No. 1 Vol. 1.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. COSO. 1994. Internal Control Integrated Framework. New York: AICPA Publication Division.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Jurnal Study & Accounting Research. No.1 Vol. 11.

Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Trikonomika. No. 2 Vol. 12.

Madjham, Anggraeni S., Sahmin Noholo, Lukman Pakaya. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian

- Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara). Jurnal Akuntansi 2013.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Marshall B, Romney, Paul John Steinbart. 2006. Accounting Information System (9th edition). Prentice Hall. Nordiawan, Deddi. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Rai, I Gusti Agung. 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seminar Nasional Akuntansi & Bisnis. Bandung.
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tatriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro
- Susilawati & Dwi Seftiani Riana. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Study & Accounting Research. No. 1 Vol. 11.
- Warren, Carl S., James M. Reeve, Philip E. Fees. 2006. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Wikiapbn. Tanpa Tahun. Ensiklopedia Kementerian Keuangan. Melalui <<http://www.wikiapbn.org/standar-akuntansipemerintahan/>>[14/8/16]